

Abstrak

Penatausahaan merupakan bagian dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang terdiri dari 3 (tiga) proses yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Pelaksanaan penatausahaan ditujukan pada Barang Milik Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ataupun dari perolehan lainnya. Tujuan dari penatausahaan salah satunya adalah untuk melaksanakan prinsip pemerintahan yang baik dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian mekanisme penatausahaan BMD pada BPKPAD Kabupaten Batang tahun 2021 dengan peraturan yang berlaku dan meninjau kendala dalam pelaksanaan penatausahaan. Aplikasi penatausahaan yang digunakan adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD. Metode yang digunakan dalam perolehan data adalah kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif terdiri atas studi kepustakaan sedangkan metode kualitatif terdiri atas wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penatausahaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penatausahaan pada BPKPAD Kabupaten Batang telah sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama penatausahaan berlangsung antara lain: (1) Dokumen Hibah dari Pemerintah Pusat/Provinsi tidak dilampirkan; (2) Pengurus Barang memperoleh informasi yang tidak valid.

Kata kunci: Pemerintahan yang baik, Penatausahaan, Barang Milik Daerah, SIMDA BMD

Abstract

The administration is part of the management of Regional Property (BMD) which consists of 3 (three) processes, namely bookkeeping, inventory, and reporting. The implementation of administration is aimed at Regional Assets originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget or other acquisitions. One of the purposes of administration is to implement the principles of good governance in preparing accountable financial reports. The writing of this paper aims to review the suitability of the BMD administration mechanism at the Batang Regency BPKPAD in 2021 with applicable regulations and to review the obstacles in the implementation of administration. The administrative application used is the Regional Management Information System (SIMDA) BMD. The methods used in data acquisition are quantitative and qualitative. The quantitative method consists of a literature study while the qualitative method consists of interviews with parties related to administration and documentation. The results showed that the administrative process at BPKPAD Batang Regency was by applicable regulatory guidelines. In addition, there were several obstacles encountered during the administration, including: (1) Documents on Grants from the Central/Provincial Government were not attached; (2) Good manager obtains invalid information.

Keywords: Good Governance, Administration, Regional Property, SIMDA BMD